

PEMBANGUNAN WILAYAH : GAGASAN RUANG EKOLOGIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN¹

Hafid Setiadi²

Abstrak

Telah lima belas tahun para pemimpin dunia menerima paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai agenda politik global, namun hingga saat ini kerusakan lingkungan pada berbagai skala tetap berlangsung bahkan pada taraf yang semakin intensif. Mencermati situasi tersebut, makalah ini mencoba untuk mengelaborasi secara singkat beberapa hal mendasar yang terkait dengan implementasi pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks pembangunan wilayah. Elaborasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegagalan implementasi pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari dominasi pemikiran mekanistik-reduksionis versi Descartes. Pemikiran tersebut mempengaruhi timbulnya gagasan yang memandang ruang semata-mata sebagai realitas fisik dan meminggirkan ranah kognisi. Oleh sebab itu, makalah ini mengedepankan gagasan ruang ekologis sebagai alternatif jalan keluar atas persoalan pembangunan kontemporer. Penerimaan gagasan ruang ekologis akan berimplikasi pada perubahan paradigma pembangunan, pendekatan perencanaan, serta metode analisis dalam pembangunan wilayah.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, gagasan ruang, ekologis-holistik, mekanistik-reduksionis

1. Pendahuluan

Dunia semakin panas. Demikian ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan betapa kondisi dunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam dua abad terakhir, penduduk bumi melonjak dramatis sebesar lima milyar. Konon, untuk mencapai angka satu milyar pertama kalinya pada abad ke-19, penduduk bumi membutuhkan waktu sekitar 2 juta tahun! Sementara itu, dibandingkan masa Revolusi Industri, konsentrasi CO₂ di atmosfer dunia telah meningkat 25%. Pada sisi lain, sejak tahun 1950, hampir 50% areal hutan tropis dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia telah hilang karena berbagai alasan. Diperkirakan selama lima dasawarsa terakhir, laju kehilangan karbon organik dunia mencapai 760 juta metrik ton per tahunnya atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 300 tahun yang lalu. Sementara itu, pernyataan FAO pada tahun 2007 ini mengungkapkan bahwa sekitar 850 juta penduduk dunia masih menderita kekurangan pangan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang terus dipacu akhirnya harus "bertabrakan" dengan kapasitas lingkungan (*ecosphere capacity*) sehingga justru akan menghancurkan kinerja pertumbuhan itu sendiri (*self-destructive*). Sehingga, seperti diramalkan oleh Thomas Robert Malthus dan dipertegas oleh *Club of Rome*, pola pembangunan yang selama ini dijalankan, justru menciptakan dunia yang "*overloaded*".

Mencermati ketidakstabilan (baca: kerusakan) dunia di atas, dapat kita pahami bersama bahwa dampak signifikan pertumbuhan penduduk dunia terhadap lingkungan sesungguhnya berjalan dalam sebuah tatanan yang teramat kompleks karena melibatkan begitu banyak faktor, seperti : kebijakan pembangunan, sistem kelembagaan dan hukum, hubungan internasional, ketimpangan akses terhadap teknologi dan modal, ketidakmerataan distribusi sumber-sumber alam, perdagangan bebas, mobilitas manusia, industrialisasi, budaya, perilaku manusia, dan sebagainya. Melalui sistim yang kompleks itulah, selama berabad-abad lamanya alam "dipenjara" oleh kepentingan manusia. Rahasia-rahasia alam terus digali dan kekayaan-kekayaan di dalamnya diambil secara paksa, sehingga totalitas profil dunia terus berubah secara fundamental ke arah yang semakin buruk.

¹ Disajikan dalam Seminar Nasional "Pembangunan Wilayah Berwawasan Lingkungan" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2007

² Staf Pengajar Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia

2. Metafora dunia: alam yang mekanistik

Mengapa manusia begitu “tega” merusak bumi yang sebenarnya merupakan pijakan utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia sendiri? Atas pertanyaan tersebut seringkali kita cukup terpuaskan dengan jawaban-jawaban pragmatis seperti: tidak adanya kesadaran, ketidakpedulian, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Namun sesungguhnya, disadari atau tidak, kerusakan bumi yang terus terjadi hingga saat ini merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung mereduksi fenomena-fenomena alam. Adalah Rene Descartes, seorang ahli matematika, yang memelopori metode analitik deduktif-reduksionisme yang sangat meyakini bahwa setiap fenomena alam yang teramat kompleks dapat dipahami dengan cara mereduksinya menjadi bagian-bagian pokoknya (Capra,1981). Keyakinan Descartes tersebut tidak dapat dilepaskan dari pandangannya bahwa alam semesta adalah sebuah struktur matematis. Melalui struktur tersebut, ia menganalogikan alam layaknya sebuah “mesin” yang berjalan dalam suatu sistem mekanis tertentu. Sehingga, menurutnya, untuk memahami mesin tersebut cara yang terbaik adalah “membongkar dan meneliti” setiap komponen yang membentuknya. Karena hanya dengan cara itulah ilmu pengetahuan dapat menghasilkan kepastian yang mutlak.

Pandangan Descartes di atas memberikan dampak luar biasa pada perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian berimbas pada tindakan manusia terhadap alam. Ilmu pengetahuan terfragmentasi ke dalam dua bagian besar, yaitu ilmu kemanusiaan dan ilmu alam. Ilmu kemanusiaan memusatkan perhatian pada “alam pikiran” (*res cogitans*), sedangkan ilmu alam memfokuskan kajiannya pada “alam materi” (*res extensa*). Dengan pemisahan ini, integrasi antara “akal” dan “materi” yang telah didengungkan secara luas oleh para filsuf Abad Pertengahan semakin terpinggirkan. Seiring dengan itu, orientasi ilmu pengetahuan yang pada awalnya lebih menekankan pada “kearifan”, “mengikuti tatanan alam”, dan “demi keagungan Tuhan”, berubah secara drastis ke arah yang berlawanan. Cara pandang terhadap alam sebagai sebuah sistem organis dengan cepat digantikan oleh metafora alam yang mekanistik. Ilmu pengetahuan pun kemudian lebih ditujukan untuk memperkuat dominasi manusia terhadap alam. Bahkan, hingga saat ini, ilmu pengetahuan seringkali digunakan untuk memberikan justifikasi ilmiah guna memanipulasi dan mengeksploitasi alam. Dalam perangkap perkembangan ilmu pengetahuan seperti di atas, perilaku-perilaku ekologis akan semakin langka ditemukan di tengah masyarakat luas.

3. Pembangunan berkelanjutan: membangun pengetahuan holistik

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil telah bersepakat untuk menerima paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai politik pembangunan global. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup ke dalam agenda pembangunan nasional setiap negara. Bersama-sama dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan hidup dijadikan sebagai pilar utama pembangunan. Dengan demikian, pada tataran tertentu, Keraf (2002) menyatakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai sebuah teori normatif yang menawarkan jalan keluar bagi kegagalan paradigma developmentalisme. Sehingga, menurutnya, paradigma pembangunan berkelanjutan sesungguhnya juga merupakan kritik terhadap ideologi pembangunan yang selama ini diterapkan oleh sebagian besar negara, yang justru mengancam kehidupan di bumi.

Namun demikian, setelah 15 tahun kesepakatan Rio de Janeiro, implementasi paradigma pembangunan berkelanjutan belum mencapai tingkat yang optimal, bahkan terkesan “jalan di tempat”. Banyak pihak yang melihat bahwa pola-pola pembangunan pasca Rio de Janeiro tidak berubah secara fundamental. Pertumbuhan ekonomi tetap dijadikan sebagai tujuan utama oleh banyak negara. Berbagai ukuran yang digunakan dalam pembangunan lebih berorientasi pada standar kehidupan material daripada kualitas kehidupan yang lebih holistik. Demikian juga dengan kepentingan manusia yang masih ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara alam hanya diposisikan sebagai instrumen demi memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, sumberdaya alam masih dipandang sebagai sumberdaya ekonomis (sebagai sumber pendapatan negara dan daya tarik investasi) daripada sumberdaya ekologis. Pada sisi lain, berbagai permasalahan lingkungan

hidup lebih dipandang sebagai permasalahan teknis yang dianggap akan dapat diselesaikan dengan penerapan teknologi dan penetapan standar baku mutu. Lebih dari pada itu, kecenderungan untuk mereduksi bentuk-bentuk kehidupan alamiah melalui kemajuan teknologi dan industrialisasi juga terasa semakin meningkat. Singkat kata, hampir tak ada perubahan muatan dalam ideologi pembangunan, hanya kemasannya saja yang berbeda.

Memang tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk dunia dan dengan demikian juga akan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk. Fenomena di atas seringkali dipahami sebagai suatu dinamika yang kelak secara mekanistik akan membawa kemajuan bagi umat manusia. Namun berbagai fakta justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat dan menghancurkan lingkungan alam. Bahkan, berbasiskan pada pendekatan-pendekatan atomistik yang berorientasi pada penonjolan diri, benturan antara kekuatan-kekuatan ekonomi pun semakin sering terjadi. Dan, seperti telah disebutkan di atas, pertumbuhan ekonomi pun akhirnya “dihancurkan” oleh dirinya sendiri. Berbagai teori ekonomi yang dibangun melalui “kepastian matematis” tidak sepenuhnya, bahkan dapat dikatakan gagal, menjelaskan kehancuran tersebut.

Bukan hanya di bidang ekonomi, kemajuan-kemajuan luar biasa pada berbagai bidang kehidupan lainnya pada akhirnya juga harus berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan reduksionisme. Capra (1981) menggambarkan bagaimana studi mengenai sistim saraf pada bidang biologi dan kedokteran semakin berkembang guna mengatasi keterbatasan mekanisme molekul. Selain itu, di bidang fisika, ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan-keterbatasan studi partikel dalam fisika klasik yang berlandaskan pada konsep Newtonian sudah dapat diatasi oleh teori kuantum. Menurutnya, teori kuantum mampu memperlihatkan bahwa partikel-partikel bukanlah materi yang saling terpisah, namun mereka saling terikat dalam suatu jaringan kosmik di mana mereka membangun pola-pola probabilitas. Begitu juga dalam bidang psikologi, Capra menjelaskan bahwa pendekatan psikologis versi Sigmund Freud yang memandang manusia sebagai mesin biologis semakin mendapat “perlawanan” dari teori energi psikus Carl Gustav Jung yang memosisikan manusia sebagai organisme.

Kemunculan teori sistim saraf, teori kuantum, dan teori energi psikus dengan jelas memperlihatkan bahwa pendekatan-pendekatan holistik secara pasti dan perlahan mulai memegang peranan. Sebagaimana dinyatakan oleh fisika modern, pendekatan holistik akan membawa kita pada pemahaman bahwa alam semesta merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terhubung, dan penuh dengan dinamika. Pemahaman terhadap alam sebagai sesuatu yang bersifat organis, sistemik, dinamis, dan kompleks merupakan salah satu faktor kunci guna mencapai keberlanjutan ekologis, seperti yang diharapkan oleh filsuf Norwegia, Arne Ness. Tak ada pemisahan antara komponen spiritual dan komponen materi. Keduanya justru melebur menjadi satu, berinteraksi, dan bahkan saling “berkomunikasi” membentuk jaring-jaring kehidupan (*the web of life*). Faktor spiritual seperti perasaan, etika, nilai, motif, selera, kepercayaan, pengetahuan, dan kesadaran menjadi bagian integral dari sistim alam secara keseluruhan. Faktor-faktor itulah yang akan memberikan pemaknaan terhadap setiap gejala kehidupan. Bahkan lebih dari pada itu, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi dinamika alam sesuai dengan hukum-hukum ekosistim.

Secara hakiki, dinamika alam tersebut akan senantiasa menyatu dengan pola-pola aliran energi dan sirkulasi materi yang jauh dari suasana kompetisi yang tidak sehat (*unfairly competition*), eksploitatif, dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, dinamika yang terbentuk akan senantiasa mengarah pada proses pendewasaan/pematangan, diversifikasi, pengaturan diri sendiri, dan penguatan ikatan antar komponen. Dalam dinamika tersebut, fenomena keteraturan dan keseimbangan akan muncul bergantian atau mungkin juga bersamaan dengan fenomena ketidakteraturan dan ketidakseimbangan. Probabilitas dan spontanitas tidak dapat dihindari, bahkan justru harus diakomodasi. Dengan demikian, perkembangan kehidupan tidak lagi berjalan secara linear-mekanistik, namun mengikuti pola non-linear. Pemikiran ala Descartes yang mendewakan hadirnya unsur kepastian berdasarkan hukum matematis pada setiap fenomena alam semesta, sudah jelas tidak akan dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Sehingga, pada akhirnya, pemikiran fragmentik-reduksionisme seyogyanya segera dialihkan kepada pemikiran

ekologis-holistik. Demikian juga halnya dengan pemikiran positivisme-deterministik yang perlu segera dialihkan ke pemikiran heurmenitik-possibilistik.

4. Gagasan ruang, paradigma ekologis-holistik, dan pembangunan berkelanjutan

Bersama-sama dengan gagasan waktu, gagasan mengenai ruang selalu muncul dalam kehidupan manusia. Setiap praktek kehidupan manusia yang selalu terkait dengan ruang. Oleh sebab itu, selama berabad-abad para filsuf pun mencoba untuk mencari dan menemukan hakekat ruang. Bahkan, hingga saat ini, perdebatan mengenai hakekat dan definisi ruang nampaknya belum akan berakhir. Perdebatan mengenai definisi ruang senantiasa bergerak di antara dua titik ekstrem yang berseberangan, yaitu ruang ideal (*ideal space*) dan ruang yang dirasakan (*perceived space*).

Ruang ideal juga dikenal sebagai ruang geometris. Atau, sesuai dengan nama pencetusnya – Euclid, ahli matematika Yunani – sering juga disebut sebagai ruang Euclidian. Mengingat latar belakang keilmuannya, tidak mengherankan apabila Euclid memahami ruang sebagai sebuah bentuk tiga dimensi yang bersifat seragam dan statis (Cavallaro, 2004). Gagasan ruang versi Euclid ini dipertegas oleh Isaac Newton yang memperkenalkan istilah ruang absolut, yaitu “wadah kosong yang terbebas dari fenomena di dalamnya, selalu tetap, dan tidak bisa digerakkan”. Berbeda dengan ruang ideal, gagasan *perceived space* lebih melihat ruang sebagai sesuatu yang abstrak. Philpot (2003) mendefinisikannya dengan pernyataan “suatu cara ketika lokasi dibayangkan dan diberi makna”. Dengan demikian, ruang menjadi bersifat cair dan dinamis, tergantung secara subyektif pada *sense* manusia yang berupaya memahaminya. Batas-batas atau ukuran ruang pun tergantung pada konteks kepentingan manusia.

Mengacu pada dua gagasan di atas, tampaknya sangat sulit bagi kita untuk menerima gagasan ruang ideal guna diterapkan dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu alasan utamanya adalah karena gagasan tersebut menempatkan ruang semata-mata sebagai sebuah latar belakang pasif. Dalam perannya yang pasif tersebut, timbul “pemisahan” antara ruang dan obyek di dalamnya. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologis yang menekankan pentingnya keterkaitan dalam suatu totalitas sistem kehidupan.

Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa implementasi ideologi dan etika pembangunan berkelanjutan perlu diperkuat oleh penerimaan yang luas akan gagasan *perceived space*. Berdasarkan gagasan *perceived space* ini, ruang menjelma menjadi sebuah dimensi yang senantiasa akan berpihak dan berkontribusi bagi terbentuknya pola, struktur, dan dinamika kehidupan melalui proses-proses alamiah, sosial, kultural, politik, dan psikologis yang berlangsung di dalamnya. Atau dengan kata lain, ruang adalah arena interpretasi manusia akan keterkaitan antara diri dan lingkungannya guna menghasilkan pengetahuan dan tindakan. Epistemologis positivisme yang sangat menekankan pada ketepatan absolut, parameter, dan ukuran ruang (Smith, 2005) menjadi tidak relevan lagi. Sehingga, pada tataran inilah gagasan ruang memiliki titik referensi yang sama dengan paradigma ekologis-holistik, yaitu menekankan pada pendekatan sistem.

5. Gagasan ruang Indonesia: perangkap positivisme?

Melalui tulisan yang berjudul *Penataan Ruang, Integrasi Nasional, dan Wilayah Tertinggal: Sebuah Tinjauan Politik Keruangan Nasional* saya telah menggambarkan bahwa diskursus mengenai ‘ruang Indonesia’ seakan-akan telah terhenti bersamaan dengan diterimanya konsep Wawasan Nusantara sebagai cara pandang nasional. Ruang Indonesia masa kini nampaknya lebih dipahami sebagai sesuatu yang *given*, statis, dan apa adanya. Dalam Undang-undang Nomor 26/2007, ruang pun dipandang hanya sebagai “wadah”. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketertarikan yang kuat ke arah pemahaman ruang sebagai “fakta obyektif yang bersifat normatif” seperti yang selalu didengungkan oleh epistemologis positivisme. Dengan demikian, pemaknaan ruang yang berdasarkan pada pengamatan obyek-obyek indrawi (ukuran, bentuk, dan pola) terasa begitu dominan. Keteraturan dan keutuhan teritorial menjadi orientasi utama yang diupayakan melalui pendekatan hirarkis dan birokratis. Sehingga, disadari atau tidak, ruang Indonesia pun tersekat-sekat ke dalam satuan-satuan politik-administratif yang lebih kecil.

Pada sisi lain, ranah kognisi cenderung terpinggirkan. Proses-proses sosial yang berkaitan dengan isu kedaulatan, kesejahteraan, tata pemerintahan, ikatan emosional, dan sebagainya tidak diberi makna “spasial”. Akibatnya, keberadaan ruang Indonesia masa kini tidak mampu lagi berkontribusi pada terciptanya penyelarasan persepsi, pemikiran, dan pengalaman orang-orang yang hidup di dalamnya. Hampir tidak ada fantasi tentang penemuan dan pengetahuan baru. Padahal, “dalam dunia yang dieksplorasi dan dirancang secara dalam, ruang masih menyimpan tanda tanya dan rahasia” (Cavallaro, 2001).

Ironisnya, distorsi pemahaman ruang yang sedang kita alami saat ini justru terjadi di tengah era perubahan yang berjalan begitu cepat. Saat ini, dunia telah terintegrasi ke dalam suatu sistem koneksi global yang semakin intensif. Sistem koneksi ini telah mempertemukan dua struktur ruang yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu “*global space*” dan “*local space*”. Pada lingkup yang lebih kecil, ruang Indonesia masa kini juga sedang mengalami “*big bang*” sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi dan tekanan urbanisasi. Secara kumulatif, faktor globalisasi, lokalisasi, desentralisasi, dan urbanisasi telah merubah konstelasi ruang pada semua tingkatan. Seiring dengan devolusi kekuasaan dari pusat ke pinggiran, tarik menarik antara kepentingan lokal, nasional, dan global juga semakin mengemuka. Persaingan dan konflik terus bergerak melintasi batas-batas teritorial politik. Bersamaan dengan semakin kaburnya batas-batas politik, eksistensi dan reputasi individu semakin mendapat kekuatan untuk menerobos sekat-sekat formalisme. Alhasil, keteraturan ruang (*spatial arrangement*) pun senantiasa berubah secara tak terduga.

Lalu, bagaimana dengan masa depan pembangunan wilayah di Indonesia? Akankah kita semakin terdorong ke dalam situasi yang tidak menentu (*chaos*)? Fondasi pemikiran dan strategi seperti apakah yang seyogyanya kita bangun dan kembangkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut nampaknya sangat relevan dengan situasi Indonesia kontemporer. Urbanisasi yang tidak terkendali, kerusakan lingkungan yang semakin luas, kemiskinan yang semakin meningkat, serta konflik sosial yang semakin sering terjadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa kita belum dapat keluar dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang sangat mendasar. Dibalik semua permasalahan tersebut, kita hampir tidak melihat adanya terobosan pemikiran pada hampir semua tingkat kebijakan. Semua kebijakan pembangunan masih tersekat dalam pemikiran mekanistik, strukturalis, dan birokratis. Demikian juga halnya dengan pola pembangunan yang cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi. Proses devolusi kekuasaan yang diharapkan memberikan energi baru bagi penguatan kapasitas lokal, justru berlangsung “kebablasan” sehingga malah memperberat beban nasional. Ego sektoral juga terasa semakin mengemuka. Bahkan, paradigma penataan ruang yang selama tiga dekade tidak pernah memunculkan cerita sukses pun, terus dipertahankan hingga saat ini.

6. Strategi pengembangan wilayah dalam perspektif ekologis: beberapa pandangan

Menurut persepektif ekologis, ruang (dunia) adalah sebuah sistim yang saling terkoneksi, dialogis, majemuk, dan modifikatif. Dengan demikian, setiap bagian dunia sampai pada skala terkecil akan dilihat sebagai sebuah sistim yang terbuka sehingga akan siap mengantisipasi perubahan zaman. Atau, dengan kata lain, perspektif ekologis memandang arah perkembangan dunia tidak semata-mata bergerak ke satu arah. Skenario masa depan dunia akan berjalan tak terduga dan penuh kemungkinan sehingga diperlukan perubahan *mind set* untuk menerima adanya “beberapa masa depan dunia”. Dengan demikian, kompetensi dan strategi pembangunan harus diuji agar mampu menghadapi apapun model masa depan yang mungkin terjadi. Patut diduga bahwa berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yang terpecah-pecah secara sektoral tidak akan mampu merumuskan kompleksitas perkembangan dunia tersebut. Karena, bagaimana pun juga, model-model masa depan hanya dibangun dan dianalisis melalui pemahaman akan perilaku lingkungan sebagai sebuah totalitas.

Berkaitan dengan itu, agar dapat keluar dari berbagai persoalan pembangunan masa kini, nampaknya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memberanikan diri untuk “menantang” paradigma lama. Paradigma ‘profitabilitas’ harus segera digantikan oleh paradigma ‘keberlanjutan’. Demikian juga dengan paradigma ‘pertumbuhan’ yang harus segera dialihkan ke paradigma ‘keseimbangan’. Sementara itu, paradigma ‘efisiensi lingkungan’ harus lebih

dikedepankan dari pada paradigma 'efisiensi teknis'. Dan terakhir, paradigma 'mendominasi alam' harus segera digeser ke paradigma 'harmonisasi dengan alam'. Guna mendukung pergeseran paradigma di atas, syarat penting yang harus dipenuhi adalah penguatan internalisasi dan institusionalisasi perspektif ekologis kepada segenap stakeholder pembangunan wilayah. Proses penguatan tersebut bukan saja membutuhkan pengetahuan (*knowledge*), tetapi lebih dari pada itu juga membutuhkan kearifan (*wisdom*). Hal ini sangat penting karena hanya kearifan-lah yang mampu mengatasi keterbatasan dan juga keangkuhan manusia dalam membuka rahasia alam.

Melalui perubahan paradigma di atas, sistim ekonomi sesungguhnya hanyalah satu aspek dari keseluruhan tatanan ekologis dan sosial. Dinamika ekonomi akan sangat tergantung pada dinamika ekologis dan sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, dominasi paradigma ekonomi terhadap dimensi ekologis dan sosial menjadi kehilangan relevansinya. Sebaliknya, berbagai landasan konseptual ekonomi yang sarat dengan model-model kuantitatif harus segera diperluas bahkan dirombak hingga mencakup sistim nilai yang berkembang di masyarakat. Berbagai kasus menunjukkan bahwa sistim nilai tersebutlah yang memberikan landasan bagi terbentuknya persepsi, selera, ide, dan wawasan yang kemudian menyediakan alternatif bagi masyarakat untuk berinovasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dan dalam konteks itulah sistim ekonomi akan berevolusi.

Konsekuensi selanjutnya dari pergeseran paradigma di atas adalah perlunya merubah pola perencanaan pembangunan wilayah dari pendekatan "diskrit" ke pendekatan "kontinum". Selama ini pola perencanaan diskrit yang terwujud dalam sekat-sekat wilayah administrasi atau satuan pulau justru menimbulkan suasana kontraproduktif karena setiap wilayah hanya berorientasi pada upaya penonjolan diri. Lebih jauh lagi, euforia kekuasaan pada masing-masing wilayah semakin mengikis prinsip-prinsip ekologis yang mengutamakan kerjasama. Batas-batas administrasi seolah-olah menjadi 'pagar beton' yang memungkinkan penghuni di dalamnya berperilaku tanpa merasa perlu berkomunikasi dengan tetangganya atau merasa khawatir mengganggu lingkungannya. Tak ada proses dialog, tak ada pembagian peran, dan tak ada proses integralisasi.

Sebaliknya, melalui pendekatan kontinum setiap wilayah atau satuan pulau akan dipandang sebagai bagian integral dari totalitas ekologis. Dengan demikian, kategorisasi spasial seperti pusat-pinggiran, kota-desa, maju-terbelakang, dan sebagainya tidak selayaknya lagi diposisikan secara berlawanan. Hal yang membuat posisi mereka berbeda semata-mata adalah derajat kehadiran faktor-faktor pembentuk karakter wilayah. Cara pandang ini secara implisit menunjukkan bahwa semua wilayah, bagaimanapun karakternya, berada pada sistim yang sama. Tak ada sekat yang membatasi mereka. Tak ada lagi istilah 'wilayah penyangga' dan 'wilayah disangga'. Di bawah paradigma ekologis-holistik, pembagian peran serta hubungan yang saling menguntungkan akan berjalan melalui sebuah sistim terbuka yang memungkinkan terjadinya aliran energi dan materi. Bila aliran meningkat sistim akan bergerak menuju bentuk keseimbangan baru. Pertumbuhan pada satu tempat, bisa jadi akan diimbangi oleh penyusutan pada tempat lain.

Guna memahami kemunculan-kemunculan berbagai keseimbangan baru diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistim ekologis, sosial, dan juga ekonomi. Untuk itu berbagai metode ilmiah yang terpotong-potong oleh fragmentasi ilmu pengetahuan harus dapat diterobos oleh 'pisau analisis' yang lebih holistik sehingga proses-proses perubahan yang kompleks dan seringkali berpola non-linear dapat dipahami secara lebih utuh. Secara implisit hal ini juga mengisyaratkan bahwa metode ilmiah yang berorientasi pada peramalan-peramalan linear perlu segera dimodifikasi. Sebaliknya, metode ilmiah yang berlandaskan pada teori sistim yang mampu mengundang para ahli dan perencana untuk berpikir "out of the box" akan semakin kuat relevansinya. Dengan demikian, tidak ada salahnya sama sekali bagi kita untuk mengambil dan bahkan menggunakan perspektif keilmuan di luar bidang ilmu kita untuk memahami berbagai fenomena alam.

7. Penutup

Selama berabad-abad, dominasi rasionalitas manusia terhadap komponen lingkungan lainnya telah mengubah tatanan dunia ke arah penyimpangan terhadap hukum alam dalam skala yang begitu luas dan besar. Oleh sebab itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa dunia

akan masuk ke dalam situasi *chaos*. Untuk menjawab situasi tersebut, para pemimpin negara, pimpinan perusahaan, ilmuwan, dan juga praktisi perlu mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Dunia tidak dapat lagi dipandang seperti pohon yang cenderung bersifat sentralistik, hirarkis, birokratis; namun kini harus dilihat seperti layaknya tumbuhan merambat yang dinamis, majemuk, dan sistimik. Dengan demikian pola pemikiran yang fragmentik, strukturalis, mekanistik, serta deterministik perlu digeser ke pola pemikiran yang ekologis-holistik, termasuk dalam strategi pengembangan wilayah.

Daftar bacaan

- Capra, F. (1981). *The Turning Point: Science, Society, and The Rising Culture*. New York: Bantam Book.
- Capra, F. (2004). *The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Cavallaro, D. (2001). *Teori Kritis dan Teori Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Niagara.
- Keraf, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Philpot, S. (2000). *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. LKiS: Yogyakarta.
- Smith, L. T. (2005). *Dekolonisasi Metodologi*. Yogyakarta: Insist Press.